See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/331928088>

Proseding Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Antara cita-cita dan Realita (Prinsip Bagi hasil dan Resiko Pembiayaan Perspektif Fatwa DSN: Survei pada BSM K...

Conference Paper · September 2017

CITATIONS

0

READS

3

1 author:

Ismaulina Ismaulina

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

11 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Pengaruh DPK dan Pembiayaan Terhadap Peningkatan Fee Based Income PT. Bank Syariah Mandiri [View project](#)

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA:
ANTARA CITA-CITA DAN REALITA**

Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

Sps UIN Jakarta Press 2017

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia:
Antara Cita-cita dan Realita

Editor:

Prof. Dr. Didin Saepudin, MA
Ahmad Irvani, SE., M.Ag
Suryani, M.Si.

Penulis:

Roikhan Mochamad Aziz
Aprilliantoni
Sugeng Priyono dan Sugeng Ribowo
Mariya Fatira dan Anriza Witi Nasution
Angga Arisa
Shofia M Hasanah dan Ima Maspupah
Ayus Ahmad Yusuf dan Amir Hamzah
Novendi Arkham Mubtadi dan Ahmad Irvani
Ismaulina dan Suryani
Novia Nengsih
Amie Amelia

SPs UIN Jakarta Press
2017

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia:
Antara Cita-cita dan Realita

Penulis:

Roikhan Mochamad Aziz
Aprilliantoni
Sugeng Priyono dan Sugeng Ribowo
Marlya Fatira dan Anriza Witi Nasution
Angga Arisa
Shofia M Hasanah dan Ima Maspupah
Ayus Ahmad Yusuf dan Amir Hamzah
Novendi Arkham Muhtadi dan Ahmad Irvani
Ismaulina dan Suryani
Novia Nengsih
Amie Amelia

ISBN : 978-602-61727-0-9

Editor

Prof. Dr. Didin Saepudin, MA
Ahmad Irvani, SE., M.Ag
Suryani, M.Si.

Penerbit

SPs UIN Jakarta Press
Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat Cirendeup Ciputat Tangsel
sps@uinjkt.ac.id
Telp. 021 7401472
Faks: 021 74706084

Cetakan pertama, September 2017

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit

Daftar Isi

Daftar Isi	iii-iv
Kata Sambutan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Masykuri Abdillah.....	v
Kata Pengantar Tim Editor.....	vii
Keynote Speech: Inovasi Fatwa-Fatwa DSN-MUI Terkait Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia).....	ix-xiv
Teori H dalam Perbankan Syariah Roikhan Mochamad Aziz.....	1-16
Merawat Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang Aprilliantoni.....	17-38
Kebijakan Investasi Portofolio Luar Negeri dan Pengaruhnya Terhadap Perbankan Syariah dalam Kebijakan Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah Sugeng Priyono dan Sugeng Ribowo.....	39-68
Mempersiapkan Generasi Perbankan Syariah Melalui Metode Praktik Berotasi Marlya Fatira dan Anriza Witi Nasution.....	69-82
Analisis Perbandingan Pendekatan Anuitas dan Flat dalam Murabahah Angga Arisa.....	83-96
Tantangan dan Peluang Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada Pasar Keuangan Syariah Shofia Mauizotun Hasanah dan Ima Maspupah.....	97-110
Analisis Determinasi Ketepatan Pelaporan Keuangan pada Sektor Keuangan Syariah di Bursa Efek Indonesia Ayus Ahmad Yusuf dan Amir Hamzah.....	111-122

**Akuntabilitas, Efisiensi, dan Zakat Governance: Upaya Menuju
Pengelolaan Zakat yang Profesional**

Novendi Arkham Muhtadi dan Ahmad Irvani.....

**Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Pembiayaan Perspektif Fatwa DSN:
Survei pada BSM Kota Lhokseumawe – Aceh**

Ismaulina dan Suryani.....

**Optimalisasi Inklusi Keuangan melalui Instrumen Redistributif
Perbankan Syariah**

Novia Nengsih.....

**Corporate Social Responsibility dan Pemberdayaan Masyarakat
pada Perbankan Syariah**

Amie Amelia.....

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. Masykuri Abdillah
Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ekonomi dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sistem ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya menjadi isu lokal yang hanya terbatas pada negara-negara muslim saja, akan tetapi telah menjadi trend global. Negara-negara non-muslim sudah banyak mengadopsi dan mengembangkan sistem sekaligus industri keuangan syariah ini.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016, menuntut kita untuk bersaing dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, cerdas dan kompetitif terutama dibidang ekonomi dan keuangan syariah.

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki kewajiban dalam meningkatkan sumber daya manusia yang terampil. Oleh karena itu, sebagai implementasi dari tridarma perguruan tinggi, Sekolah Pascasarjana mengadakan seminar nasional ekonomi dan keuangan syariah dengan tema: *Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia*.

Makalah-makalah para dosen, peneliti, dan praktisi ekonomi dan keuangan syariah yang dipresentasikan pada seminar nasional disajikan dalam *proceeding*, agar menjadi sumbangsih keilmuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan editor yang telah meluangkan waktunya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan *proceeding* dapat diterbitkan. Semoga *proceeding* ini dapat menjadi salah satu khazanah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji-syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga Seminar Nasional dan *Call For Papers* Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dapat terlaksana dengan baik pada tanggal 17 Mei 2017. Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini mengusung tema “Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia.” Melalui seminar nasional ini diharapkan terhimpun berbagai pemikiran dan gagasan dari para peserta yang terdiri atas akademisi, peneliti dan praktisi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Prosiding ini memuat 12 makalah hasil pemikiran dan penelitian yang dikirim oleh para dosen, peneliti, dan praktisi ekonomi dan keuangan syariah dari berbagai kota di Indonesia. Makalah-makalah tersebut kami himpun dalam prosiding yang salah satunya disampaikan oleh Keynote Speech yaitu Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin. Makalah-makalah berikutnya dikelompokkan sesuai dengan bidang dan tema yang merepresentasikan artikel tentang Perbankan Syariah dan Non-Perbankan Syariah. Prosiding yang diterbitkan pada tahun 2017 ini telah melalui tahapan evaluasi oleh *reviewer* yang kompeten di bidangnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah beserta jajarannya sehingga prosiding ini dapat diterbitkan. Tak lupa kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemakalah yang hadir untuk mempresentasikan makalahnya pada acara Seminar Nasional tersebut.

Dalam penyusunan prodising ini sudah pasti terdapat kekurangan serta keterbatasan yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf.

Saran dan kritik untuk kesempurnaan prosiding ini sangat kami harapkan. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya para pemerhati maupun praktisi ekonomi dan keuangan syariah.

Tim Editor

**PRINSIP BAGI HASIL DAN RISIKO PEMBIAYAAN PERSPEKTIF
FATWA DSN: SURVEI PADA BSM KOTA LHOKEUMAWA - ACEH**

Ismaulina

ismaulina@gmail.com

Dosen FEBI IAIN Lhokseumawe

Suryani

suryapijar@yahoo.com

Dosen FEBI IAIN Lhokseumawe

Abstrak

Prinsip ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan bersama. Wujud dari penerapan prinsip keadilan ini ialah penerapan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai (1) Penerapan prinsip bagi hasil dan risiko pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe; (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip bagi hasil oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe; (3) Kesesuaian penerapan prinsip bagi hasil dengan Ekonomi Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan hasil kajian dan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: (1) PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe menerapkan prinsip *revenue sharing* pada produk BSM *mudharabah* dan BSM *musyarakah*. Kedua produk memiliki risiko gagal bayar, penyelewengan pembiayaan dan manipulasi keuntungan yang tinggi, sehingga BSM menerapkan sistem proteksi ganda mulai dari seleksi calon nasabah, verifikasi dokumen serta monitoring pelaksanaan kegiatan nasabah. (2) Kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah Mandiri adalah kendala internal, legal dan eksternal. (3) Penerapan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan fatwa mengenai sistem bagi hasil *revenue sharing* Nomor 15/DSN- MUI/IX/2000, pembiayaan *musyarakah* Nomor 08/DSN- MUI/IV/2000 dan pembiayaan *mudharabah* Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Kata kunci : bagi hasil, resiko pembiayaan, fatwa DSN.

A. Pendahuluan

Pendirian bank Islam telah dimulai sejak 1970-an. Tujuannya untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.¹ Tujuan ini baru bisa diwujudkan di Indonesia tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia.² Bank ini merupakan pelopor pertama berdirinya perbankan

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 12.

² Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama di Indonesia. BMI pertama kali beroperasi yaitu pada tanggal 1 Mei 1992, tepatnya 4 tahun setelah Pakto 88. Pada awal dioperasikannya, keberadaan bank syariah ini tidak memiliki landasan hukum

syariah, bahkan sampai sekarang keberadaannya masih ada dan mampu bersaing dengan perbankan syariah yang baru muncul saat ini. Lahirnya bank dengan sistem syariah ini menjadi alternatif bunga bank yang dipandang sebagai riba serta menjawab kerinduan umat Islam akan sistem perbankan bebas riba.

Bank syariah ini lahir di Indonesia setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil.³ Undang-undang tersebut secara rinci menjelaskan landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah serta memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁴ Tidak hanya sampai disini, perkembangan bank syariah dan unit usaha syariah (bank-bank konvensional yang membuka unit syariah sebagai perwujudan *dual banking system*) juga diperkokoh dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁵ Dalam hal ini, perbankan syariah muncul dengan wajah yang berbeda tentunya yang tidak mengandung unsur riba yaitu bagi hasil atau yang sering dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing*.

Sistem bagi hasil dalam dunia perbankan syariah merupakan *core* atau *formula* yang diajukan oleh para pakar ekonomi Islam sebagai alternatif pengganti sistem bunga. Prinsip bagi hasil (*Profit and loss sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Syariah secara keseluruhan. Selain itu, di dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dari prinsip inilah yang membedakan konsep bunga pada bank konvensional dengan konsep bagi hasil pada bank syariah. Penggunaan sistem ini menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki harus benar.⁶

Sistem bagi hasil meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Penghitungan

tetap. Baik mengenal operasionalnya, maupun jenis-jenis usaha atau produk yang ditawarkan. Tahun 1994, selang dua tahun didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka.

³ Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 26.

⁵ R. A. Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Jakarta: Cintya Press, 2011), vi.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 119.

bagi hasil ini berlaku pada pengumpulan dana dan penyaluran dana atau yang sering dikenal dengan istilah pembiayaan. Prinsip bagi hasil pada perbankan syariah berlaku pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.⁷

Penerapan prinsip bagi hasil pembiayaan di bank syariah yang terjadi di lapangan masih belum optimal. Karena pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dengan sistem *profit and loss sharing* dalam perjalanannya sulit untuk diterapkan sebab bank di samping berbagi keuntungan dengan nasabah juga harus berbagi kerugian. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Abdullah Saeed terhadap bank-bank Islam yang beroperasi di Timur Tengah.⁸ Ia menyatakan bahwa bank Islam enggan menjalankan produk-produk bersistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) karena dianggap memiliki risiko yang tinggi dan pengembaliannya tidak pasti, untuk pihak bank sehingga bank mencari alternatif pembiayaan lain yang memiliki tingkat risiko yang lebih rendah yakni *murabahah*.

Akhirnya pembiayaan jual beli (*murabahah*) mendominasi akad pembiayaan dan paling mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini dibuktikan dengan data statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Mei (2009), menunjukkan bahwa total komposisi pembiayaan yang diberikan bank syariah dan unit usaha syariah sebesar 5,47 Triliyun yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara nasional pada tahun 2003 hanya sebesar 20,3 % (persen) dan pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang sebesar 71, 2% (persen).⁹ Sedangkan pada tahun 2009 total pembiayaan 40,715 yang terdiri dari pembiayaan *murabahah* 23,490, *mudharabah* tercatat 8,672, *musyarakah* 5,939 sedangkan sisanya pembiayaan lain.¹⁰ Artinya pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Alasan pembiayaan ini (pembiayaan *murabahah*) lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) karena dalam mendapatkan usaha profit, kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) yang dilakukan bank syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Tetapi juga bank syariah melakukan kegiatan pembiayaan (penyaluran dana) dengan prinsip jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) dan *ujroh* (*ijarah*).¹¹

⁷ Dwi Suwiknyo, Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), 10.

⁸ Ridha Kurniawan Adnans, "Penerapan Sistem jual beli *Murabahah* pada Bank Syariah (studi terhadap pembiayaan rumah/properti padabank Negara Indonesia Cab. Medan)" (Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007), 1.

⁹ Kumpulan Artikel BNI Syariah, "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia" *Al Kautsar Prima*, (2006): 47.

¹⁰ Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 (2011): 481.

¹¹ Faizal, Agung dan Prabawa, Sri Adji, "Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil" *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 8, No.1, (2010): 65-72.

Prinsip Bagi Hasil dan Resiko Pembiayaan

Walaupun pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki risiko yang lebih tinggi di bandingkan akad pembiayaan lainnya, tetapi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini pada kenyataannya tetap berjalan. Dan seharusnya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah sebaiknya harus lebih didominasi oleh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yakni *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan karakteristik bank syariah itu sendiri, akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Dan hal itulah yang menyebabkan penyaluran dana dengan prinsip jual beli atau non bagi hasil terutama *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Ini tentunya masih bertentangan dengan prinsip pembiayaan yang seharusnya diutamakan pada perbankan syariah. Dan untuk Penetapan transaksi pembiayaan *mudharabah* terangkum dalam Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 *Pembiayaan Mudharabah/Qiradh*, kemudian untuk pembiayaan *musyarakah* dalam Fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 *Pembiayaan Musyarakah*.

Selanjutnya pembiayaan *Murabahah* adalah bank menyebutkan jumlah keuntungannya dengan menegaskan harga beli barang dan harga jualnya. Pembiayaan *murabahah* ini bagi nasabah merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi dan pengadaan barang lainnya; disini nasabah akan mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian. Risiko utama dari pembiayaan *murabahah* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur *wanprestasi* atau *default*, risiko pasar apabila *murabahah* diberikan dalam bentuk Valuta Asing yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar.

Pada umumnya pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan investasi jangka pendek dan di sinyalir terdapat ketidaksesuaian antara penerapan *murabahah* di bank syariah dengan ketentuan syariah yang ada. Hal ini seperti yang pernah diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmawaty (2007) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pihak bank tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label Islam. Di kalangan ulama fiqh pun, keabsahan pembiayaan *murabahah* masih *debatable*.¹² Begitu pula dengan penelitian Trisadini Prasastinah Usanti, bahwa nasabah penerima fasilitas pembiayaan tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi tentang klausula yang ada dalam akad pembiayaan. Klausula eksemisi yang ada dalam akad (kontrak baku) ternyata juga dipakai untuk memperoleh keuntungan yang memberatkan salah satu

¹² Kiki Priscillia Ramadhani, "Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di kota Mojokerto)"(Jurnal Ilmiah, fakultas ekonomi dan bisnis universitas Brawijaya, Malang. 2014), 3.

pihak.¹³ Untuk menghindari risiko pembiayaan pada perbankan syariah, bank mengalihkan kepada pembiayaan *murabahah* namun pembiayaan tersebut masih bertentangan dengan prinsip pembiayaan yang seharusnya tertuang dalam prinsip syariah dan fatwa DSN yang mengatur tentang pelaksanaan transaksi jual beli (pembiayaan *Murabahah*) yang ditetapkan berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *Murabahah*.

Jadi, sudah seharusnya bank dengan nasabah memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian bahkan secara ekonomi tidak berdaya lagi. Disini lah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dan risiko (*Profit and Loss Sharing*) pembiayaan atau penyaluran dana dalam perbankan syariah, agar kedua belah pihak baik bank maupun nasabah peminjam dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sehingga produk *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*, akan tetap menjadi produk pembiayaan bagi bank syariah pada masa yang akan datang.

Dengan kata lain dalam kegiatan bermuamalah tersebut harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang hukum ekonomi Islam. Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mengatur mengenai kegiatan antar manusia tersebut dikenal dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Syariah di dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁴ Melihat dari fenomena ini, peneliti melakukan penelitian kepada Bank Syariah Mandiri cabang Lhokseumawe. Hal ini dilakukan karena Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia yang tingkat perkembangan dan kepercayaan masyarakat paling tinggi dibandingkan dengan bank-bank lainnya ini dibuktikan dengan kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia sekitar 700 unit, serta menggunakan sistem syariah di dalam pengelolaan keuangannya.

B. Kajian Kepustakaan

1. Fatwa DSN

Ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya langka sesuai dengan *al-iqtisad al-syariah* atau tujuan ditetapkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan

¹³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Akad Baku pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah" *Jurnal Perspektif*, Vol. XVIII, No. 1, (2013): 47.

¹⁴ Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

moral dari masyarakat.¹⁵ Definisi tersebut mengaitkan antara persoalan ekonomi dan persoalan sosial kemanusiaan yang menjadi tujuan syariat Islam. Jadi tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan material sebagaimana dikemukakan oleh para ekonom kapitalis. Sistem ekonomi Islam dimaksudkan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh individu individu dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam di seluruh kegiatan dan kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan dengan memberikan hak pada setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mulia baik di dunia maupun di akhirat nantinya.¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pemikir ekonomi Islam melihat persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi, berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan bernilai ekonomis.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:¹⁷

- a) Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam erat kaitannya dengan masalah kepemilikan, di mana kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif.
- b) Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara dari hasil pendapatan Negara seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), *kharaaj* (pajak atas daerah yang taklukan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman), dan sebagainya.
- c) Prinsip khalifah dalam ekonomi Islam ialah manusia diberikan mandat untuk mengelola bumi tanpa mengabaikan prinsip moral yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist.
- d) Prinsip keadilan dalam ekonomi bisa diterapkan dalam hal penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Ekonomi Islam mempunyai ciri ciri khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Ciri ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang universal. Maksudnya ialah ekonomi Islam mempunyai hubungan yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat.
- b) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya mendapat kedudukan utama.

¹⁵ M. Umer Chagha, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk, "Landscape Baru Perekonomian Masa Depan", (Jakarta: SEBI, 2001), 131.

¹⁶ Husain Sahatah, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 80.

¹⁷ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 38-43.

¹⁸ Ahmad Muhammad Al-Azsal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa Drs. H. Imam Saefuddin, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 21-37.

- c) Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

2. Prinsip Bagi Hasil dan Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Perbankan syariah ialah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah atau muamalah Islam. Bank syariah dikenal dengan sebutan bank bagi hasil karena kegiatan operasional menggunakan prinsip bagi hasil sebagai sistem penghimpunan dana dan penyaluran dana. Prinsip ini memberikan karakteristik khusus bagi bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Prinsip tersebut termuat dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad ini telah diterapkan dalam produk pembiayaan, meskipun jumlahnya masih relatif kecil tetapi melihat konsepnya akad ini lebih unggul dalam rangka menciptakan keadilan. Berikut ini dijelaskan penerapan produk tersebut pada bank syariah:

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama dua orang atau lebih, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan.¹⁹ Menurut Adiwarmanto A. Karim, *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.²⁰ Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/*shahibul maal* menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.

Pengertian Pembiayaan *Mudharabah* dalam praktik perbankan Syariah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek/usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Bank Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan penerapan akad ini sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan, yaitu:

¹⁹ Sofinayah Ghufro, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta, Renaissans, 2005), 45.

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 204.

Ketentuan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUL/IV/2000	
Pertama: Ketentuan Pembiayaan	
1.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2.	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.
3.	Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4.	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syaria'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5.	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6.	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8.	Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9.	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .
10.	Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan	
1.	Penyedia dana (<i>sahibul maal</i>) dan pengelola (<i>mudharib</i>) harus cakap hukum.
2.	Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3.	Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada <i>mudharib</i> untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal

- diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah masih belum optimal mengingat resiko yang tinggi yang harus ditanggung pihak bank, sehingga mereka harus mempertimbangkan berulang kali menyalurkan pembiayaan ini. Diantara resiko tersebut ialah:

- 1) *Slide streaming* artinya nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam akad;

- 2) Lalai dalam mengelola usaha secara disengaja;
- 3) Penyembunyian keuntungan dari nasabah yang tidak jujur.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *asy-syirkah* yang berarti percampuran antara sesuatu dengan lainnya, sehingga sulit dibedakan.²¹ Sedangkan secara terminologi, akad *musyarakah* ialah ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.²² Secara sederhana *musyarakah* dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya.

Akad *musyarakah* di aplikasikan perbankan syariah sebagai salah satu akad dalam pembiayaan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah. Akad ini biasanya ditujukan untuk menambah modal proyek dan modal ventura. Pembiayaan Proyek, dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Sedangkan modal ventura dalam hal ini bank melakukan penanaman modal untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Pembiayaan ini diawasi oleh DPS dalam hal pemenuhan syariatnya sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN berikut ini:

Ketentuan Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000	
1.	Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2.	Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset <i>musyarakah</i> dalam proses bisnis normal.d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan

²¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* Cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 165.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 136.

- aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal
 4. Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan desain kualitatif. Untuk memahami lebih mendalam mengenai kesyariahan praktik bagi hasil dan resiko pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe menurut Ekonomi Islam dan Fatwa DSN, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis*. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk membaca data untuk lebih memahami data bukan sebagai serangkaian peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan. *Content analysis* selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi²³.

Terpilihnya BSM sebagai tempat penelitian dikarenakan lembaga ini memiliki sistem pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan mendapat persepsi yang positif dari nasabah.

Adapun pihak-pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kepala PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe
2. Asisten Manajer Operasi dan
3. Bagian Pembiayaan

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data untuk menjawab permasalahan yang dikaji, yakni data *primer* dan data *sekunder*. Data primer berupa data wawancara dengan kepala cabang dan asisten manajer PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe. Sedangkan data sekunder berupa data dokumentasi, seperti draf akad, laporan keuangan, standar operasional dan dokumen pendukung lainnya. Untuk memperoleh kedua jenis tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data berupa prinsip bagi hasil yang diterapkan, resiko pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* serta kendala yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan tersebut. Demikian halnya dengan penggunaan dokumentasi yang diperuntukkan bagi terpenuhi data berupa dokumen pendukung untuk kelengkapan penelitian ini.

Setelah data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya ialah melakukan analisa data dengan teknik deskriptif dan komparasi. Deskriptif merupakan teknik penguraian hasil penelitian secara menyeluruh untuk menggambarkan mendalam mengenai prinsip bagi hasil, resiko yang dihadapi serta kendala-kendala penerapan pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe. Sedangkan metode komparasi digunakan untuk membandingkan hasil penelitian pada objek tersebut dengan fatwa DSN dan ketentuan dalam Ekonomi Islam.

²³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 15.

D. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Resiko Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe - Aceh

Penyaluran dana pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe - Aceh, dengan prinsip bagi hasil (BSM *Mudharabah* dan BSM *Musyarakah*) berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi resiko moral *hazard* nasabah. Oleh sebab itu pihak memproteksi secara ganda untuk penyaluran dana ini. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya gagal bayar ialah Marketing dan bagian Kredit diwajibkan meneliti secara seksama menyeleksi calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Di antara aktivitas yang wajib dilakukan oleh Marketing dalam hal mencegah moral hazard nasabah ialah:²⁴

- a. Melakukan verifikasi data antara formulir permohonan dengan nama di KTP;
- b. Memastikan alamat pada KK sesuai dengan yang tertera di KTP / paspor / SIM nasabah serta memastikan bahwa KK tersebut tertera tandatangan pengurus dan cap RT / RW setempat;
- c. Nasabah diwajibkan memberikan informasi mengenai keterangan penghasilan.

Adapun dokumen yang dipersyaratkan untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini ialah foto kopi KTP, Kartu Keluarga, foto copi atau salinan dokumen jaminan dan data penunjang, seperti foto kopi surat izin praktek (SIP) dan NPWP (untuk profesional), Surat Izin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) untuk wiraswasta. Sedangkan untuk badan usaha, BSM mensyaratkan nasabah melengkapi dokumen berupa asli surat permohonan pembiayaan, foto copi legalitas badan usaha berupa akta pendirian, informasi tentang anggaran dasar dan perubahannya, termasuk pengesahan dari Departemen kehakiman dan Lembaran Berita Negara. Selain itu Badan Usaha juga disyaratkan melengkapi dokumen lainnya, seperti:²⁵

- a. Foto kopi Legalitas usaha berupa: SIUP, TDP, NPWP, dan izin lainnya;
- b. Laporan keuangan (Neraca, Laba/Rugi) 2 tahun terakhir, khusus pembiayaan dengan total limit diatas Rp. 5 milyar, wajib didukung dengan laporan keuangan audit, dan sebagainya;
- c. Data rencana usaha atau perincian peruntukan pembiayaan;
- d. Studi kelayakan proyek, khusus untuk pemberian pembiayaan untuk tujuan investasi kepada nasabah yang total limit diatas Rp. 5 milyar;

Setelah data terkumpul pihak BSM melakukan analisis pembiayaan. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan analisis pembiayaan ialah mempertimbangkan semua faktor resiko yang akan ditanggung dengan ekspektasi hasil yang akan diperoleh dari rencana pembiayaan. Selanjutnya BSM akan memutuskan memberikan pembiayaan yang dilakukan oleh Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan rekomendasi persetujuan

²⁴ Wawancara dengan Lutfi Al-Fahmi sebagai Marketing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe 05 Agustus 2015.

²⁵ *Ibid*

Prinsip Bagi Hasil dan Resiko Pembiayaan

yang diberikan dalam NAP. Setelah itu, bank akan memberikan persetujuan kepada nasabah disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3).

Melihat ketatnya persyaratan yang diwajibkan oleh pihak BSM untuk nasabah yang mengambil pembiayaan ini disebabkan tingginya resiko yang harus ditanggung baik resiko gagal bayar, penyelewengan pembiayaan dan manipulasi keuntungan oleh nasabah. Sehingga pihak bank dalam mencairkan dana dengan prinsip bagi hasil menerapkan prinsip berikut ini:²⁶

a. Prinsip Dual Control

Proses pencairan pembiayaan harus dilakukan oleh unit lain yang terpisah dari unit analisis dan keputusan pembiayaan.

b. Prinsip Comply With (Kepatuhan terhadap Syarat)

Pencairan pembiayaan merupakan implementasi dari sebuah persetujuan pembiayaan yang dicantumkan dalam nota analisis. Yang kemudian dituangkan dalam SP3 dan Akad Pembiayaan. Oleh sebab itu maka setiap pencairan harus memenuhi syarat (*comply with*) yang ditetapkan dalam SP3 dan Akad Pembiayaan.

Tidak diperketat dengan prinsip di atas, pihak bank juga memastikan kembali kelengkapan dan keabsahan dokumen nasabah yang tercantum dalam SP3 sebelum menentukan waktu pencairan. Selanjutnya melakukan pengecekan dokumen yang diserahkan tersebut diatas, dengan menggunakan formulir Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) dan tahap akhir ialah menerima rekomendasi dari Manajer Operasi dan persetujuan Kacab. Setelah serangkaian prosedur dijalankan, bank akhirnya ditentukan waktu pencairan pembiayaan.

Sebagai langkah lanjutan dari kerja sama antara pihak BSM dengan nasabah, pihak bank melakukan monitoring pembiayaan. Monitoring pembiayaan adalah tindakan pengawasan atau pengawalan dalam pengelolaan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dilunasi nasabah. Cakupan dari monitoring ini adalah:²⁷

- a. Memastikan bahwa setiap tahapan proses pemberian pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- b. Memastikan bahwa semua persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah, meliputi:
 - 1) Monitoring penguasaan dan pengamanan jaminan;
 - 2) Monitoring penutupan asuransi;
 - 3) Monitoring pemenuhan dokumen pembiayaan lainnya.
- c. Monitoring portofolio pembiayaan;
- d. Monitoring perkembangan usaha nasabah;
- e. Monitoring penggunaan pembiayaan;
- f. Monitoring dokumen pembiayaan yang akan jatuh tempo;
- g. Monitoring kualitas aktifitas produktif dan PPAP;
- h. Monitoring masalah yang timbul pembiayaan.

Adapun sistem penentuan nisbah pada BSM ialah penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan BSM *Mudharabah* dan BSM *Musyarakah* ialah didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan sistem *Revenue Sharing* yaitu nisbah bagi hasil

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

Prinsip Bagi Hasil dan Resiko Pembiayaan

ditentukan berdasar total pendapatan usaha. Total pendapatan usaha ini masih belum dikurangi biaya-biaya. Artinya pendapatan usaha diukur dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, selisih dari sinilah yang menjadi obyek nisbah bagi hasil. Untuk lebih jelas berikut disajikan simulasi perhitungan BSM *Mudharabah* dan BSM *Musyarakah*:

Simulasi BSM *Mudharabah*:

Kebutuhan Modal Kerja	Rp. 100.000.000,00
Pembiayaan Bank	Rp. 100.000.000,00 (100%)
Rencana Penerimaan Usaha	Rp. 60.000.000,00 per tahun
Jangka Waktu	3 bulan
Ekspektasi Rate	18 % p.a
Realisasi Pendapatan Usaha	Rp. 5.000.000,00 per bulan
Bagi hasil yang diterima Bank	Rp. 1.500.000,00;
Bagi hasil yang diterima Nasabah	Rp. 3.500.000,00

Simulasi BSM *Musyarakah*:

Kebutuhan Modal Kerja	: 150.000.000,00
Modal Sendiri	: 50.000.000,00 (min. 30%)
Pembiayaan Bank	: Rp. 100.000.000,00 (max. 70%)
Rencana Penerimaan Usaha	: Rp. 50.000.000 per tahun
Jangka Waktu	: 12
Ekspektasi Rate	: 19 % p.a
Realisasi Pendapatan Usaha	: 15.000.000,00 per bulan
Bagi Hasil Yang Diterima BANK	: Rp. 5.700.000,00; (38.000.000,00%)
Bagi Hasil Yang Diterima Nasabah	: Rp. -5.699.985,00; (-37.999.900,00%)

Kesepakatan pihak yang di maksud di atas bukan murni kesepakatan pihak bank dengan nasabah tetapi nasabah diberikan peluang memilih persentase nisbah yang telah ketentuan Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat. Artinya BSM memberikan penawaran permintaan prosentase nisbah kepada mitra usaha yang besarnya tertentu. Sedangkan mitra usaha melakukan penawaran dengan menyesuaikan pendapatan usahanya di lapangan (secara riil). Apabila ada kesepakatan maka pembiayaan bisa dilaksanakan dan berlaku sebaliknya.

2. Kendala Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe, Aceh

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggolongkan kendala dan hambatan dalam beberapa kategori:²⁸

a. Internal

Kendala internal berasal dari pihak bank sendiri dalam pelaksanaan pembiayaan dan ruang lingkupnya. Diantara kendala tersebut ialah:

- 1) Kesulitan dalam menentukan proyeksi yang tepat ini berkaitan dengan memproyeksi bagaimana usaha yang dijalankan oleh mitra usaha

²⁸ Wawancara dengan Muhammad Azwar sebagai General Apport Asistant pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe pada 5 Agustus 2016.

berkembang kedepan. Faktor ini mungkin diperlukan kejelian dari pihak bank dalam menganalisa, walaupun pihak mitra usaha sudah memberikan gambaran tentang usahanya, tetapi pihak bank harus mempunyai kemahiran tersendiri. Biasa yang terjadi pihak mitra usaha dalam memberikan laporan tentang gambaran usahanya diambil yang terbaik, sedangkan kelemahan disembunyikan.

- 2) Sumber Daya Manusia dalam hal ini pihak bank dalam menganalisa suatu permohonan pembiayaan masih dipertanyakan. Karena faktor inilah pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri masih jauh dari harapan secara kuantitas pembiayaan. Dengan ditandainya penyaluran pembiayaan yang bertumpu pada pembiayaan *murabahah* saja.

- 3) Kesulitan dalam mempercayai laporan nasabah mengenai perhitungan Omzet, Biaya, untung-rugi dan sebagainya. Untuk menangani permasalahan ini pihak bank melakukan pembagian pendapatan (*revenue sharing*) sebagai upaya untuk memperkecil manipulasi data yang dilakukan pihak mitra usaha. Walaupun ini tidak menajutkan seratus prosen (100%) kebenaran, tapi dengan ini pihak bank aman.

- b. Aspek legal ialah peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan perbankan syariah masih terbatas.

- c. Eksternal

Faktor eksternal ini disebabkan oleh pihak luar yang mempengaruhi penerapan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah, seperti:

- 1) Kesulitan dalam monitoring setiap bulan dan pengauditannya. Permasalahan ini berkaitan dengan proses awal dari pemberian pembiayaan. Jika karakter mitra usaha sudah menunjukkan kecurigaan sebaiknya pihak bank lebih protektif terhadap penyaluran dananya. Dalam proses monitoring bulanan ini, masing-masing pihak mempunyai kepentingan. Transparansi atau kejujuran pelaksana dana diperlukan karena itu monitoring diadakan.

- 2) Faktor Sumber Daya Manusia

Hal ini berkaitan dengan karakter mitra usaha dalam memberikan data-data berkaitan dengan pendapatan usaha, omzet usaha maupun prospek usaha. Itikad baik pelaksana dana dipertanyakan.

3. Kesesuaian Penerapan Prinsip Bagi Hasil dengan Fatwa DSN

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe - Aceh menerapkan prinsip bagi hasil pada dua produk, yaitu BSM *mudharabah* dan BSM *musyarakah*. BSM *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana *shahibul maal* menyediakan modal sedangkan *mudharib* menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka. Sedangkan BSM *Musyarakah* merupakan perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Perhitungan Nisbah bagi hasil di Bank Syariah mandiri (BSM) adalah atas dasar laba dan rugi bulanan (dengan sistem *revenue sharing*). Transparansi bagi hasil untuk nasabah telah disampaikan kantor pusat kepada cabang-cabang. Dengan Pertimbangan aman, Bank Syariah Mandiri menggunakan perhitungan nisbah bagi hasil berdasarkan atas tingkat pendapatan usaha yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Penerapan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN. Hal ini terbukti bahwa:

- a. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil ada kesepakatan berdasarkan pilihan yang telah ditetapkan oleh BSM Pusat;
- b. Analisis proyeksi keuntungan dan tawar-menawar sehingga saling rela (*'antaraadhim minkum*);
- c. Nasabah dengan pihak saling percaya, sehingga asas akad ini terpenuhi (azaz kepercayaan);
- d. Syarat dan ketentuan lain pembiayaannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*;
- e. Akad ini dijalankan secara transparan, perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan analisis usaha nasabah;
- f. Metode perhitungan yang dipakai oleh BSM, yaitu menggunakan metode *revenue sharing* dengan nisbah bagi hasil menurun, yang diangsur setiap bulannya. Metode *revenue sharing* yang diterapkan di BSM sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000;
- g. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BSM menarik jaminan berupa sertifikat tanah, sertifikat toko, BPKB. Pelaksanaan jaminan *mudharabah* dan *musyarakah* di BSM, yaitu apabila pihak mitra lalai atau menyalahi kontrak ini, maka pihak mitra usaha BSM dibolehkan meminta jaminan kepada mitra usaha. Tetapi apabila kerugiannya disebabkan oleh faktor resiko bisnis, maka jaminan mitra usahah tidak dapat disita oleh pihak BSM;
- h. Untuk pengembalian modal dilakukan dengan cara diangsur, hal ini dikhawatirkan apabila dibayar diakhir periode usaha maka akan terjadi resiko *idle fund* (pengendapan dana) di tangan mitra usaha yang nantinya akan mengakibatkan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh.
- i. Pada BSM tersebut sasaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pengusaha makro dan menengah;
- j. Apabila nasabah belum bisa melunasi angsuran pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, maka solusinya yaitu pihak BSM akan menghubungi nasabahnya untuk mengadakan studi kelayakan usahanya, kemudian pihak BSM akan memberikan tiga kali peringatan, namun apabila nasabah tetap belum bisa melunasinya maka pihak BSM akan membolehkan nasabahnya untuk menunda angsuran dengan cara mengadakan kesepakatan ulang antara nasabah dengan pihak BSM yaitu dengan cara memperbaiki *akad* untuk memperpanjang jumlah waktu pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*;
- k. Pada saat nasabah menyalahgunakan dananya, maka solusinya adalah pihak BSM akan menarik jaminan dari mitra usaha yang menyalahgunakan dana pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*;

1. Penulis juga memberikan beberapa pertanyaan kepada 10 nasabah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai sampel dalam penelitian ini.²⁹ Hal ini dilakukan oleh penulis untuk membuktikan jawaban dari asisten manajer operasi, sehingga penulis mengetahui kenyataan yang dialami oleh para nasabah BSM tersebut. Ternyata setelah penulis menganalisis lebih lanjut kepada 10 nasabah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, ditemukanlah kesesuaian antara pihak BSM dan nasabah, sehingga BMT tersebut dalam menggunakan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu metode *revenue sharing*.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka penerapan prinsip bagi hasil pada produk BSM *Mudharabah* dan BSM *Musyarakah* tidak bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah* Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dan pembiayaan *mudharabah* Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme penyaluran dananya mulai dari negosiasi *akad* yang dilakukan, kejelasan *akad* terdiri dari kejelasan modal, nisbah, dan usaha yang dibiayai, tujuan pembiayaan berupa usaha produktif, implikasi pembiayaan meliputi keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama, dan lainnya. Negosiasi *akad* pada PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah* Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dan pembiayaan *mudharabah* Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, di mana pihak dan nasabah menyetujui beberapa hal secara jelas dan tegas terkait objek *akad*, yakni modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Semua itu dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Sehingga kedua *akad* tersebut baik itu *akad mudharabah* dan *musyarakah* telah memenuhi prinsip kerelaan kedua belah pihak dan terhindar dari unsur *gharar* yang menyebabkan kecacatan *akad*.

Pembiayaan yang menggunakan prinsip *musyarakah* adalah merupakan pembiayaan bisnis yang menggunakan prinsip bagi untung dan rugi (*profit loss and sharing*) yang seharusnya menjadi dasar operasional perbankan syariah. Namun berdasarkan tabel Jumlah Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri sampai saat ini pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* dan *mudharabah* masih relatif kecil penggunaannya oleh masyarakat bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti *qardh*, *murabahah*, dan *mudharabah*. Sedangkan pembiayaan yang dominan digunakan pada Bank Syariah Mandiri diberikan dalam bentuk *qardh* dan *murabahah*. Dominasi pilihan yang jatuh pada *qardh* dan *murabahah* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi nasabah disebabkan karena *qardh* dan *murabahah* itulah kebutuhan riil masyarakat. Sedangkan dari sisi Bank Syariah Mandiri disebabkan karena Bank Syariah Mandiri ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*), dari tingkat keuntungan *qardh* dan *murabahah* yang telah ditentukan.

Rendahnya implementasi pembiayaan proyek dengan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri disebabkan beberapa hal:

- a. Sumber dana bank syariah sebagian besar berjangka pendek, sehingga tidak digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.

²⁹ Wawancara dengan nasabah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada 15 Agustus 2016.

Prinsip Bagi Hasil dan Resiko Pembiayaan

- b. Usaha yang menggunakan pembiayaan bagi hasil umumnya mempunyai tingkat keuntungan rendah, sedangkan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi cenderung menggunakan suku bunga yang sudah pasti jumlahnya (*adverse selection*).
- c. Usaha yang menggunakan pembiayaan bagi hasil umumnya mempunyai tingkat resiko tinggi, misalnya usaha-usaha yang relatif baru.
- d. Pengusaha cenderung membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis untuk menarik perhatian bank, akan tetapi sering menyulitkan pihak bank dikemudian hari.
- e. Pengusaha mempunyai pembukuan ganda dan menyampaikan laporan dengan keuntungan yang lebih rendah kepada bank (*moral hazard*).
Disamping itu rendahnya pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) diperbankan syariah disebabkan juga oleh:

- a. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank karena menyediakan dana yang besar juga harus menanggung resiko yang besar jika terjadi kerugian.
- b. Sulit mencari nasabah yang berkarakter dan berintegritas, pekerja keras dan jujur. Karena tanpa hal ini, maka debitur yang mendapatkan skim pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* bisa memanipulasi laporan keuangannya, sehingga jumlah keuntungan yang dibagi dengan pihak bank menjadi kecil.

Adapun faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*) sehingga dalam praktik perbankan syariah menjadi kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lain, yaitu:³⁰

- a. Standar moral yang rendah dari masyarakat muslim, sehingga tidak memungkinkan penggunaan *Profit Loss and Sharing (PLS)* dalam skala yang luas sebagai mekanisme investasi.
- b. Ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah* merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan kedalam pembiayaan institusional menjadi terhambat.
- c. Berkaitan dengan para pengusaha. Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada bank konvensional. Bank syariah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi yang lain keterlibatan yang intens dan tinggi terhadap aktivitas mitra usahanya akan mencitutkan hati dan

³⁰ Hirsanuddin, "Kemitanan Dalam Bisnis: Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah Di Perbankan Syariah)" (disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), 173-182.

motivasi pengusaha yang menghendaki adanya kebebasan yang maksimal dalam menggunakan dana yang diberikan oleh bank. Shuhrukh R. Khan, yang melakukan penelitian pada islamisasi sistem perbankan di Pakistan mengamati : Hak mengawasi dan monitor yang ketat yang diizinkan bagi bank dan kekhawatiran terhadap perkembangannya apa yang dimiliki perusahaan barang kali dalam kasus apapun, membatasi penggunaan model investasi ini dari sudut pandang pengusaha.

- d. Dari segi biaya. Pemberian pembiayaan bisnis dengan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat, dengan memperkerjakan para ahli teknis maupun ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dibiayai dengan maksud untuk mencermati dan meneliti jalannya proyek yang dibiayai oleh bank (*shohibul maal*), pengguna dana (*mudharib*). Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankan yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman, dan akibatnya akan menimbulkan biaya yang lebih besar terhadap pemakaian dana tersebut. Tambahan dana yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung mitra ketika mengembalikan dana pembiayaan bagi hasil.
- e. Segi teknis. Problem teknis menyangkut penggunaan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari pihak bank syariah sendiri profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan menjalankan mekanisme bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Disisi lain dengan menggunakan sistem bagi hasil bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.
Dari sisi nasabah bank, kebutuhurufan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal ini akan menyulitkan dalam membuat catatan akuntansi secara rinci. Padahal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.
- f. Kurang menariknya sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dalam aktivitas bisnis. Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbukanya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga terhadap intervensi bank terhadap urusan manajemen usaha. Disamping itu juga resiko akan lebih menjadi hambatan serta dapat dipertanggungjawabkan apabila *mudharib* menunjukkan itikad tidak jujur dan berbuat jahat karena ia dapat mengatur harta bank, stok barang, atau menerima kredit dan mengadakan

hutang, atau mengubah sejumlah uang bantuan atau yang dijanjikan serta barang-barang bisnis menjadi lain dan sebagainya. Ia dapat membuka rekening serta instrumen yang dapat dinegosiasi dengan mengatasnamakan perusahaan. Semua yang tersebut di atas, sebagai agen sebuah bank, ia dapat mengikatannya dengan berbagai cara melalui kontrak dan sebagainya, yang dapat memberikan bukti merugikan bank, khususnya apabila ia sebagai agen umum dengan kekuasaan untuk melakukan negosiasi kontrak yang mutlak.

- g. Masalah efisiensi. Pembiayaan dengan menggunakan sistem (*mudharabah* dan *muayarakah*) membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, dengan maksud untuk menghindari resiko kegagalan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib*, oleh karena itu pemberi modal (*shahibul maal*) harus menggunakan teknologi audit untuk memeriksa hasil (*outcome*) yang dilaporkan oleh *mudharib*. Hal ini memerlukan biaya keagenan (*agency*) pembiayaan keluar (*out side financing*) yang menempatkan perusahaan di bawah pembatasan-pembatasan keuangan.
- Para pengkritik ekonomi dan keuangan Islam menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam sangat mahal untuk dilaksanakan dan tidak berjalan sesuai dengan persoalan informasi asimetrik yang terdapat dalam kontrak kemitraan dan keagenan. Kritikan ini dilandasi oleh dua asumsi:
- 1) Kemitraan dan keagenan merupakan satu-satunya kontrak keuangan alternatif lain yang tersedia berdasarkan sistem Islam; dan/atau
 - 2) Tidak ada mekanisme optimal yang dapat ditemukan yakni insentif yang sesuai bagi orang perorangan dan memberikan kendali yang optimal terhadap *moral hazard*.

E. Penutup

1. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe menerapkan prinsip *revenue sharing* pada produk BSM *Mudharabah* dan BSM *Muayarakah*. Kedua produk memiliki resiko gagal bayar, penyalahgunaan pembiayaan dan manipulasi keuntungan yang tinggi, sehingga BSM menerapkan sistem proteksi ganda mulai dari seleksi calon nasabah, verifikasi dokumen serta monitoring pelaksanaan kegiatan nasabah.
2. Kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah Mandiri ialah kendala internal, legal dan eksternal. Kendala internal meliputi kesulitan menentukan proyeksi keuntungan usaha nasabah dan sulit mempercayai laporan keuangan nasabah. Aspek legal ialah masih terbatas regulasi yang dapat memproteksi resiko pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan aspek eksternal ialah sulitnya melakukan monitoring dan sumber daya manusia dari pihak mitra usaha yang sulit dipercayai.
3. Penerapan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan fatwa mengenai sistem bagi hasil *revenue sharing* Nomor 15/DSN- MUI/IX/2000, pembiayaan *muayarakah* Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dan pembiayaan *mudharabah* Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim, Adiwarman, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Adnans, Ridha Kurniawan, *Penerapan Sistem jual beli Murabahah pada Bank Syariah (studi terhadap pembiayaan rumah/properti pada bank Negara Indonesia Cab. Medan)*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.
- Ahmad, Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa Drs. H. Imam Saefuddin, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk, "*Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*", Jakarta: SEBI, 2001.
- Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 3 (2011): 481
- Faizal, Agung dan Prabawa, Sri Adji, "Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil" *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. 8 No.1, (2010): 65-72.
- Ghufron, Sofiniyah, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta, Renaisan, 2005.
- Hirsanuddin, *Kemitraan Dalam Bisnis: Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah Di Perbankan Syariah)*. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Isretno, R. A. Evita, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta: Cintya Press, 2011.
- Kumpulan Artikel BNI Syariah, "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia", *Al Kautsar Prima*, 2006.
- Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muslimin, H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ramadhani, Kiki Priscillia, "Analisis Kesyarahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto)", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sahatah, Husain, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004.
- Subendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suwiknyo, Dwi Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wawancara dengan Lutfi Al-Fahmi sebagai Marketing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe 05 Agustus 2015.
- Wawancara dengan Muhammad Azwar sebagai General Apport Asistant pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe pada 5 Agustus 2016.
- Wawancara dengan nasabah pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada 15 Agustus 2016.